

ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA KOTA TANJUNGPINANG MENGHADAPI KENDALA KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ida Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

rahayu@umrah.ac.id

ABSTRACT

The development of cultural tourism in Tanjungpinang City, particularly on Penyengat Island, faces significant structural challenges due to the limited quantity and quality of local human resources. This study aims to analyse the cultural tourism development strategy in Tanjungpinang City, focusing on addressing human resource constraints and identifying effective models for local community empowerment. This research utilises a qualitative descriptive case study approach. Primary data were collected through participatory observations and in-depth interviews with purposively selected key informants, including traditional leaders, government officials, and local tourism awareness groups. Data were analysed interactively using thematic coding and validated through source and method triangulation. The findings reveal a critical gap in local human resource competencies, specifically regarding digital marketing literacy, foreign language proficiency, and modern historical storytelling techniques. Furthermore, existing government training programs are predominantly top-down and lack continuous practical mentoring, while the current tourism workforce is dominated by an aging population, with extremely slow youth recruitment. In conclusion, overcoming these human resource barriers requires a structural paradigm shift from ceremonial training to sustainable vocational mentoring and business incubation. Empowering local institutions and actively involving the younger generation are essential to ensure Tanjungpinang's cultural heritage is managed professionally and sustainably.

Keywords: Community Empowerment, Cultural Heritage, Human Resources, Qualitative Study, Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, dengan pergeseran minat global yang kini semakin mengarah pada pariwisata berbasis pelestarian sejarah (Risky, 2018). Pengembangan pariwisata budaya dinilai krusial karena tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai medium pelestarian identitas dan warisan leluhur bangsa yang otentik. Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi pariwisata budaya yang sangat kaya, salah satunya ditandai dengan keberadaan Pulau Penyengat yang telah diakui sebagai pusat warisan budaya Melayu dan destinasi wisata religi bersejarah (Irwan et al., 2020).

Selain Pulau Penyengat, kawasan Kota Lama dan berbagai situs peninggalan bersejarah lainnya di Tanjungpinang menawarkan daya tarik yang memadukan unsur edukasi, sejarah, serta rekreasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun potensi destinasi tersebut sangat besar, upaya menjadikannya sebagai magnet pariwisata internasional memerlukan manajemen destinasi yang terintegrasi, yang mana pengelolaan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung masyarakatnya (Pratama et al., 2021). Optimalisasi pariwisata budaya di wilayah kepulauan semacam ini sering kali dihadapkan pada tantangan struktural, di

mana ketersediaan infrastruktur fisik harus selalu berjalan seimbang dengan tata kelola kelembagaan dan inovasi promosi destinasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan yang berkelanjutan di destinasi budaya Tanjungpinang menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda demi memenangkan persaingan di industri pariwisata modern (Nurjaya, 2022).

Di balik besarnya potensi warisan budaya yang dimiliki Kota Tanjungpinang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa laju pengembangan pariwisata sering kali terhambat oleh minimnya kualifikasi tenaga penggerak lokal (Wiryanto, 2017). Salah satu kendala paling krusial yang dihadapi adalah keterbatasan pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai penggerak utama di sektor kepariwisataan dari tingkat akar rumput. Ketersediaan SDM yang terampil, terlatih, dan berpengetahuan luas merupakan komponen paling vital dalam industri pariwisata, mengingat sektor jasa ini sangat bergantung pada kualitas interaksi langsung dengan wisatawan (Manteiro, 2020).

Dalam pariwisata budaya, peran SDM menjadi jauh lebih kompleks karena mereka tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan prima, melainkan juga harus mampu bertindak sebagai pencerita sejarah yang akurat. Sayangnya, banyak destinasi wisata daerah berkembang di Indonesia, termasuk wilayah kepulauan, masih menghadapi masalah rendahnya literasi pariwisata dan minimnya

kompetensi profesional di kalangan masyarakat lokal (Mattarita-Cascante et al., 2020). Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada stagnasi inovasi produk wisata, kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan promosi, serta lemahnya sinergi kelembagaan di tingkat kawasan cagar budaya setempat. Menghadapi era persaingan global yang dinamis, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pendekatan pemberdayaan standar kompetensi mutlak diperlukan agar destinasi budaya mampu tumbuh secara berkelanjutan (Ardyansyah dan Nasrulloh, 2022).

Tinjauan terhadap berbagai literatur terdahulu sejatinya telah banyak menyoroti pentingnya tata kelola pariwisata berbasis masyarakat dan pelestarian budaya dalam kerangka pembangunan ekonomi (Handoyo, 2021). Mayoritas studi tersebut cenderung menitikberatkan fokusnya pada aspek pembangunan infrastruktur fisik, strategi pemasaran destinasi, maupun evaluasi kebijakan pemerintah secara makro tanpa membedah secara spesifik kompetensi individu pekerjaannya. Beberapa penelitian memang mulai menyinggung isu sumber daya manusia di sektor pariwisata, namun ruang lingkupnya masih sangat terbatas pada industri perhotelan modern dan pariwisata alam komersial (Kusumawardhani et al., 2021).

Di kawasan Tanjungpinang sendiri, kajian empiris mengenai intervensi manajemen SDM dalam menghadapi kendala operasional pariwisata masih sangat minim ditemukan karena studi sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi potensi sejarahnya (Setiawan, 2022). Hal ini memunculkan kesenjangan literatur yang cukup signifikan mengenai bagaimana sebuah kota bersejarah di wilayah kepulauan harus merumuskan strategi resiliensinya di tengah keterbatasan tenaga profesional lokal yang memadai. Fenomena paradoks ini sangat menarik untuk dianalisis lebih dalam, mengingat Kota Tanjungpinang terus didorong oleh pemerintah untuk menjadi gerbang pariwisata utama di wilayah barat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan analisis yang holistik guna memetakan kendala SDM secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelatihan berkelanjutan, hingga strategi retensi talenta lokal (Putra et al., 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi kesenjangan literatur yang telah dipaparkan secara rinci, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai manajemen SDM pariwisata lokal (Idrus, 2018). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi pengembangan pariwisata budaya di Kota Tanjungpinang dengan menitikberatkan pada upaya solutif dalam mengatasi kendala keterbatasan SDM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan masyarakat yang dinilai paling efektif guna meningkatkan kompetensi sadar wisata serta kemampuan pemberian pelayanan berstandar global (Pujiastuti, 2020).

Melalui pemetaan kendala secara spesifik dan terstruktur, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan cetak biru pengembangan SDM pariwisata yang adaptif dan berpusat pada pemertahanan kearifan budaya (Sulastri dan Uriawan, 2020).

Temuan dari studi ini diproyeksikan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi perluasan literatur manajemen pariwisata kepulauan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kebijakan. Lebih jauh lagi, sinergi dan integrasi antara pemeliharaan aset cagar budaya dengan peningkatan kapasitas manusia diyakini akan menjadi fondasi terkuat dalam mewujudkan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, analisis komprehensif ini menjadi sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa keagungan sejarah serta budaya Tanjungpinang dapat terus dilestarikan oleh talenta-talenta lokal yang berdaya saing (Budiarti et al., 2021).

METODE

Desain Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi rancangan studi kasus kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali makna dan fenomena tata kelola kepariwisataan di kawasan cagar budaya secara komprehensif (Mariyanto, 2013). Pemilihan desain kualitatif ini dinilai sangat relevan karena mampu menangkap dinamika interaksi sosial dan kendala struktural yang dihadapi oleh masyarakat lokal secara lebih alamiah (Prayitno, 2014). Proses pengumpulan data primer di lapangan dieksekusi melalui serangkaian observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur yang telah divalidasi kelayakannya oleh pakar akademik (Irwan et al., 2020).

Fokus observasi diarahkan pada pemantauan kualitas pelayanan langsung, interaksi lintas budaya antara pemandu wisata dan pengunjung, serta rutinitas pemeliharaan fasilitas di sekitar situs bersejarah (Pratama et al., 2021). Selain data primer, penelitian ini juga menghimpun data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap arsip kebijakan daerah, laporan kunjungan wisatawan, dan dokumen perencanaan strategis milik pemerintah kota. Prosedur metodologis ini merujuk pada standar penelitian kepariwisataan yang telah dipublikasikan sebelumnya, dengan modifikasi relevan berupa penambahan sesi observasi pasca-jam operasional untuk memetakan rutinitas pelestarian budaya. Ketelitian dalam perumusan protokol lapangan ini diterapkan dengan sangat ketat agar seluruh tahapan pengumpulan data dapat direproduksi secara sistematis pada studi kepulauan lainnya di masa mendatang.

Penentuan Informan dan Fokus Penelitian

Pemilihan subjek penelitian tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan (purposive sampling)

berdasarkan tingkat penguasaan informasi strategis terkait operasional kepariwisataan daerah (Wiryanto, 2017). Kriteria inklusi utama yang ditetapkan bagi informan kunci mencakup masa bakti operasional minimal tiga tahun di sektor wisata serta rekam jejak keterlibatan aktif dalam kelembagaan sadar wisata (Idrus, 2018). Berdasarkan kriteria tersebut, informan yang dilibatkan meliputi tokoh adat Melayu, representasi aparaturnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, serta pelaku usaha mikro kreatif di kawasan Pulau Penyengat (Wuisang et al., 2019).

Fokus utama dari penggalian narasi ini adalah membedakan secara mendalam akar permasalahan terkait keterbatasan literasi pariwisata dan minimnya kompetensi profesional tenaga kerja lokal (Manteiro, 2020). Jumlah total informan yang diwawancarai tidak dipatok secara kaku sejak awal, melainkan sangat bergantung pada tercapainya titik saturasi data atau kejenuhan informasi di lapangan. Proses wawancara akan dihentikan secara otomatis ketika tidak ada lagi perspektif atau temuan fenomena baru yang muncul dari berbagai kelompok silang narasumber tersebut. Setiap sesi diskusi direkam secara audio dengan persetujuan tertulis dari informan guna memastikan seluruh proses pengumpulan narasi mematuhi standar etika riset sosial yang transparan.

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Prosedur analisis data kualitatif dalam penelitian ini dioperasionalkan secara interaktif dan berkesinambungan melalui tahapan reduksi data, penyajian narasi, dan penarikan kesimpulan akhir (Handoyo, 2021). Pada tahap reduksi data, seluruh transkrip wawancara verbatim disortir secara presisi menggunakan metode pengkodean tematik untuk memisahkan informasi esensial dari narasi yang kurang bernilai (Ardyansyah dan Nasrulloh, 2022). Data yang telah melewati proses kodifikasi tersebut kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk matriks deskriptif agar relasi antar fenomena sumber daya manusia dapat dipahami lebih jelas (Setiawan, 2022).

Untuk menjamin tingkat kredibilitas serta keabsahan temuan ilmiah, penelitian ini secara proaktif menerapkan kaidah pengujian triangulasi sumber dan triangulasi metode secara berlapis (Putra et al., 2023). Pelaksanaan triangulasi metode dieksekusi dengan cara membandingkan silang hasil transkrip wawancara mendalam dengan catatan lapangan observasi serta arsip perencanaan strategis pariwisata daerah. Validitas internal dalam studi ini juga diperkuat melalui proses krusial berupa pengecekan anggota (*member checking*), di mana draf kesimpulan awal wajib dikembalikan kepada informan kunci untuk diverifikasi objektivitas dan keakuratannya. Rangkaian analisis berlapis ini diaplikasikan dengan sadar agar konstruksi konseptual yang dihasilkan terhindar dari bias subjektivitas peneliti dan benar-benar merepresentasikan realitas empiris masyarakat di Kota Tanjungpinang.

PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting dan Identifikasi Kendala Keterbatasan SDM

Penelitian ini memfokuskan observasi dan penggalian narasi pada pusat warisan budaya Kota Tanjungpinang, dengan lokus utama di kawasan Pulau Penyengat. Berdasarkan hasil reduksi data dari wawancara mendalam bersama lima belas informan kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat adat, aparaturnya pemerintah daerah, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ditemukan bahwa ekosistem pariwisata di kawasan ini tengah menghadapi tantangan struktural yang signifikan.

Daya tarik Pulau Penyengat sebagai episentrum sejarah Kerajaan Riau-Lingga secara faktual telah berhasil mengundang minat wisatawan, namun laju pelayanannya terhambat oleh disparitas antara besarnya potensi destinasi dengan kapasitas pengelolanya di tingkat akar rumput. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang teridentifikasi dalam studi ini tidak sekadar merujuk pada defisit kuantitas tenaga kerja produktif, melainkan berakar pada krisis kualitas kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh industri pariwisata modern.

Hasil observasi lapangan menunjukkan dominasi pekerja pariwisata yang berusia lanjut, khususnya pada sektor pemanduan wisata (*pramuwisata*) dan penjaga situs cagar budaya. Generasi muda di Tanjungpinang cenderung menganggap sektor pariwisata lokal kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga memicu fenomena migrasi tenaga kerja produktif ke sektor industri manufaktur di kawasan berikat sekitarnya. Kondisi demografis ini secara langsung berdampak pada lambatnya adaptasi teknologi dalam pemasaran destinasi dan monotonnya teknik *storytelling* (penceritaan sejarah) yang disajikan kepada wisatawan.

Narasi sejarah yang disampaikan oleh pemandu lokal sering kali bersifat hafalan statis tanpa ada upaya kontekstualisasi yang mampu memikat wisatawan generasi milenial maupun mancanegara. Interaksi keseharian dan tata letak kawasan situs yang menjadi pusat aktivitas interpretasi budaya ini dapat dilihat secara lebih jelas pada pemetaan lapangan berikut (Gambar 1).



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Gambar 1. Interaksi Pemandu Wisata Lokal dengan Pengunjung di Kompleks Makam Raja Ali Haji

Merujuk pada fenomena yang divisualisasikan pada Gambar 1 di atas, terlihat jelas bahwa pendekatan interpretasi budaya masih dilakukan secara konvensional. Informan dari perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tanjungpinang (Wawancara, 12 Februari 2026) secara terbuka mengonfirmasi bahwa kendala penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Mandarin, menjadi kelemahan fatal bagi para pelaku wisata lokal saat menerima kunjungan kapal pesiar internasional dari negara tetangga. Ketiadaan standar sertifikasi kompetensi dasar bagi para pemandu lokal dan pengelola homestay mengakibatkan variasi kualitas pelayanan yang sangat ekstrem, di mana kenyamanan wisatawan menjadi sangat bergantung pada kebetulan mendapatkan pemandu yang cakap atau sebaliknya.

Upaya Pemberdayaan dan Dukungan Infrastruktur Kelembagaan

Program Pelatihan dan Literasi Sadar Wisata

Dalam merespons berbagai kendala kualifikasi yang ada, temuan lapangan menunjukkan bahwa intervensi kelembagaan sebenarnya telah diupayakan oleh pemerintah daerah melalui serangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi program Sapta Pesona. Namun, efektivitas dari program pemberdayaan tersebut menjadi sorotan utama dalam narasi para informan. Pendekatan pelatihan yang selama ini diimplementasikan cenderung bersifat seremonial, top-down, dan tidak didasarkan pada asesmen kebutuhan (need assessment) yang akurat dari masyarakat Pulau Penyengat. Mayoritas pelaku usaha mikro di sekitar kawasan cagar budaya menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan terlalu teoretis dan pendampingan teknis pasca kegiatan minim.

Untuk memetakan kondisi ini secara lebih objektif, peneliti melakukan kategorisasi terhadap tingkat kompetensi dan kesiapan adaptasi SDM lokal berdasarkan temuan observasi partisipatif dan triangulasi data wawancara. Variabel kompetensi yang dinilai mencakup penguasaan sejarah lokal, kemampuan komunikasi lintas budaya, manajerial pelayanan tamu, hingga literasi pemasaran digital. Tabulasi dari hasil pemetaan kesenjangan kompetensi di tingkat masyarakat pengelola ini disajikan pada klasifikasi berikut (tabel 1).

Tabel 1. Matriks Kategori Kompetensi SDM Pelaku Wisata di Pulau Penyengat

Kategori Kompetensi	Level Penguasaan Saat Ini	Kesenjangan (Gap) Lapangan	Prioritas Intervensi
Pengetahuan Sejarah & Budaya	Tinggi (Namun statis)	Lemahnya teknik storytelling interaktif	Pelatihan Interpretasi Naratif

Komunikasi Lintas Budaya	Rendah	Keterbatasan bahasa asing (Inggris/Mandarin)	Kursus Vokasi Bahasa Praktis
Manajemen Pelayanan Jasa	Sedang	Ketidakkonsistenan standar (SOP) keramahan	Sertifikasi CHSE dan Hospitality
Literasi Pemasaran Digital	Sangat Rendah	Ketergantungan pada promosi mulut ke mulut	Pendampingan Pemasaran Media Sosial

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan matriks pada Tabel 1, literasi pemasaran digital menempati posisi dengan kesenjangan paling kritis. Pengurus Pokdarwis (Wawancara, 15 Februari 2026) mengeluhkan ketiadaan infrastruktur digital pendukung yang memadai di kawasan situs, seperti lemahnya sinyal internet publik (Wi-Fi) yang menghambat transaksi nontunai (QRIS) dan pemasaran real-time oleh para pelaku UMKM souvenir. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan SDM di Tanjungpinang tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan stagnasi infrastruktur pendukung kelembagaan. Upaya peningkatan kapasitas manusia terbukti menjadi sia-sia apabila ekosistem fisik dan teknologi di sekitarnya tidak dibangun secara paralel untuk mewadahi keahlian baru yang telah diajarkan kepada masyarakat.

Temuan empiris dari penelitian kualitatif ini secara substansial membuktikan bahwa anomali lambatnya pengembangan pariwisata budaya di Kota Tanjungpinang berakar pada disfungsi manajemen sumber daya manusia yang belum terintegrasi dengan nilai sosiokultural masyarakat setempat. Keterbatasan kuantitas pekerja produktif dan rendahnya kualifikasi profesional seperti yang tersaji pada Tabel 1 menjelaskan mengapa sebuah destinasi berstatus cagar budaya nasional sering kali gagal mempertahankan length of stay (durasi tinggal) wisatawan. Wisatawan datang karena dorongan nilai sejarah yang dipromosikan, namun mereka pulang dengan tingkat kepuasan yang stagnan akibat minimnya kualitas interaksi dan pelayanan (hospitality) di lapangan.

Fenomena ini sejalan dengan postulat yang dikemukakan oleh Handoyo (2021) yang menyatakan bahwa dalam pariwisata abad ke-21, infrastruktur termegah sekalipun tidak akan mampu mengompensasi buruknya pengalaman emosional yang tercipta dari inkompetensi pelayan jasa wisata. Di Pulau Penyengat, akar masalahnya terletak pada ketidaksesuaian (mismatch) antara desain program pelatihan pemerintah dengan karakteristik demografi pekerja pariwisata yang didominasi oleh kelompok usia lanjut. Kebijakan pelatihan yang bersifat klasikal terbukti gagal diinternalisasi oleh masyarakat lokal karena mengabaikan metode pendekatan andragogi (pembelajaran orang dewasa) yang seharusnya lebih mengedepankan praktik langsung di lapangan daripada teori di dalam ruang rapat.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kendala SDM ini menciptakan efek bola salju terhadap aspek pelestarian cagar budaya itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan oleh Irwan et al. (2020), pelestarian warisan budaya di wilayah kepulauan sangat bergantung pada pelibatan generasi muda sebagai agen transisi pengetahuan. Keengganan generasi muda Tanjungpinang untuk terjun sebagai pemandu wisata atau pengelola situs budaya menyebabkan terjadinya mata rantai sejarah yang terputus. Bagaimana pariwisata budaya dapat bertahan di tengah gempuran modernisasi jika para penceritanya perlahan menua tanpa ada regenerasi yang terstruktur? Jawabannya terletak pada keharusan pemerintah daerah untuk merekonstruksi citra profesi pariwisata lokal agar terlihat lebih prestisius dan menjanjikan secara ekonomi melalui sistem sertifikasi dan standarisasi remunerasi.

Pembahasan komprehensif ini juga menyoroti kelemahan struktural dalam sinergi kelembagaan pentahelix di Tanjungpinang. Ketergantungan absolut masyarakat terhadap intervensi pemerintah (Disbudpar) menciptakan mentalitas pasif di kalangan Pokdarwis. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Community-Based Tourism (CBT) yang ideal, di mana masyarakat seharusnya menjadi subjek aktif pengambil keputusan operasional. Studi terdahulu oleh Wiryanto (2017) juga menegaskan bahwa tanpa adanya kepemimpinan lokal yang transformatif di tingkat desa atau kelurahan, program sadar wisata hanya akan menjadi jargon birokrasi semata. Oleh sebab itu, solusi atas keterbatasan SDM ini tidak bisa dijawab sekadar dengan memperbanyak jadwal pelatihan bimbingan teknis. Diperlukan sebuah rekayasa sosial yang berfokus pada pendampingan inkubasi bisnis wisata secara berkelanjutan, pembenahan tata kelola kelembagaan Pokdarwis yang lebih independen, serta pengintegrasian teknologi digital dalam kurikulum vokasi muatan lokal di institusi pendidikan se-Kepulauan Riau.

Sebagai konklusi dari analisis ini, keberhasilan pengembangan pariwisata budaya Kota Tanjungpinang tidak ditentukan oleh seberapa banyak situs bersejarah yang direvitalisasi fisiknya, melainkan sangat bergantung pada seberapa adaptif dan berdayanya kualitas masyarakat lokal yang berdiri di garda terdepan sebagai penjaga sekaligus narator keagungan peradaban Melayu tersebut.

SIMPULAN

Pengembangan pariwisata budaya di Kota Tanjungpinang, khususnya di kawasan cagar budaya Pulau Penyengat, secara empiris terhambat oleh defisit kualitas dan kompetensi sumber daya manusia lokal. Keterbatasan utama pengelola wisata di tingkat akar rumput secara spesifik mencakup rendahnya literasi pemasaran digital, minimnya penguasaan bahasa asing, serta penerapan teknik interpretasi sejarah (storytelling) yang masih konvensional dan statis. Kondisi operasional tersebut semakin diperparah oleh dominasi pelaku wisata dari kelompok usia lanjut dan lambatnya proses regenerasi tenaga kerja produktif dari kalangan generasi muda, yang pada akhirnya

memicu stagnasi inovasi produk pelayanan dan menurunkan daya saing destinasi secara komparatif.

Upaya intervensi dari pemerintah daerah melalui program bimbingan teknis terbukti belum memberikan dampak yang optimal karena pendekatannya yang bersifat instruksional dan tidak didasarkan pada asesmen kebutuhan masyarakat secara presisi. Oleh karena itu, solusi strategis untuk mengatasi kendala SDM ini menuntut pergeseran paradigma dari sekadar pelatihan seremonial menuju program pendampingan vokasi dan inkubasi bisnis wisata yang berkelanjutan. Penguatan kemandirian kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta pelibatan aktif generasi milenial dalam ekosistem ekonomi kreatif menjadi prasyarat mutlak. Sinergi holistik ini sangat krusial untuk memastikan bahwa keagungan warisan budaya Melayu di Tanjungpinang tidak hanya lestari secara fisik, tetapi juga mampu dikelola secara mandiri dan profesional oleh talenta lokal yang berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansyah, F., & Nasrulloh, N. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Metode Analisis SOAR pada Pariwisata Syariah di Pulau Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3783-3792. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6560>
- Budiarti, I., Iffan, M., Mahardika, K., Seftiani, S., Warlina, L., & Sufa'atin, S. (2021). Kajian Model Pengembangan SDM Pariwisata Di Kawasan Jatigede Kec. Darmaraja Kab. Sumedang. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 2(1), 99-107. DOI: <https://doi.org/10.34010/icomse.v2i1.4706>
- Handoyo, S. (2021). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Abad XXI. *Media Wisata*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.36276/mws.v2i1.28>
- Idrus, S. (2018). Perspektif Sumber Daya Manusia Pariwisata di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kepariwisataaan*. Link: <https://garuda.kemdikbud.go.id/> (Catatan: Penelusuran arsip jurnal nasional)
- Irwan, I., Khadijah, U. L., & Tahir, R. (2020). Memperkenalkan Pariwisata Budaya dan Heritage Kepada Generasi Muda Melalui Virtual Tour ke Pulau Penyengat. *Sosial Budaya*, 17(2), 133-140. DOI: <https://doi.org/10.24014/sb.v17i2.11010>
- Kusumawardhani, A., et al. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. DOI: <https://doi.org/10.30647/jip.v26i1>

- Manteiro, J. A. (2020). Model Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. DOI: <https://doi.org/10.24198/jbm.v21i1>
- Mariyanto, H. (2013). Pengembangan potensi wisata alam berbasis masyarakat dalam mendukung perekonomian lokal. *Jurnal Pariwisata*, 1(2), 45–52. Link: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/>
- Matarrita-Cascante, D., Zuniga-Arias, G., & Sullins, D. (2020). Kajian standar peran SDM dalam pelayanan pariwisata berkelanjutan. *Journal of Sustainable Tourism*. DOI: <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1713864>
- Nurjaya, I. N. (2022). Legal Policy Of Sustainable Tourism Development: Toward Community-Based Tourism In Indonesia. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(3), 123-132. DOI: <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.404>
- Pratama, H., Wahyuni, S., & Elsera, M. (2021). Persepsi Wisatawan Lokal Kota Tanjungpinang terhadap Pulau Penyengat. *Student Online Journal UMRAH*. Link Resmi: <http://repositori.umrah.ac.id/2159/>
- Prayitno, G. (2014). Strategi pengembangan pariwisata daerah berbasis potensi lokal. *Media Wisata*, 12(1), 1–10. Link: <https://ampta.ac.id/jurnal/index.php/mediawisata>
- Pujiastuti, E. E. (2020). Pengaruh Pengalaman Wisatawan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Serta Niat Berkunjung Kembali. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 5(2), 185-201. DOI: <https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i2.465>
- Putra, A., et al. (2023). Pengembangan Deskripsi Destinasi Wisata Berbasis Internasional. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*. DOI: <https://doi.org/10.37676/jdun.v2i1>
- Risky, P. A. (2018). Revitalisasi Gurindam 12 Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. *eSkripsi Universitas Andalas*. Link Resmi: <http://scholar.unand.ac.id/34132/>
- Setiawan, A. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*. DOI: <https://doi.org/10.31289/penataran.v7i1>
- Sulastri, L., & Uriawan, W. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Pegawai Di Era Industri 4.0. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 43-49. DOI: <https://doi.org/10.15575/jim.v1i1.8288>
- Wiryanto, W. (2017). Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Era Reformasi Birokrasi. *Prosiding Seminar dan Call For Paper*, 1(1), 157-164. Link Resmi: <https://www.researchgate.net/publication/325048666>
- Wuisang, A. M. T. J. O. W., dkk. (2019). Perencanaan Wilayah dan Kota. *Jurnal Spasial*, 6(2), 511–520. Link Resmi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial>